

Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan)

Ryan Irwansyah Pasaribu¹, Kusmilawaty²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : irwansyahryan.23@yahoo.com, kusmilawaty@uinsu.ac.id

Abstract The purpose of the study was to analyze how the role of Civil Service Cooperatives Medan city government in improving the welfare of its members. This research is in the form of descriptive qualitative research. Researchers conducted observations, notes, and interviews during the data collection process. From the results of the study shows that the cooperative civil servants (KPN) Medan City Government has a very large role in the welfare of its members. The benefits include the provision of ease of Business Financing assistance services, educational scholarships for family members and the provision of training/workshops to improve the ability of human resources (HR). And also advised to cooperatives should cooperatives always improve and maintain the efforts that have been made in improving the welfare of members who are members and always make improvements to the efforts that the target has not been achieved. cooperatives always remain guided by the principles, foundations, principles, and goals of cooperatives in improving the welfare of cooperative members.

Keywords: The Role Of Cooperatives And Member Welfare

Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana peran Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan observasi, catatan, dan wawancara selama proses pengumpulan data. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyejahterakan anggotanya. Manfaatnya berupa pemberian kemudahan layanan bantuan pembiayaan usaha, beasiswa pendidikan bagi keluarga anggota dan pemberian pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Dan juga disarankan kepada koperasi hendaknya koperasi selalu meningkatkan dan mempertahankan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang menjadi anggota dan selalu melakukan perbaikan terhadap usaha-usaha yang targetnya belum tercapai. koperasi selalu tetap berpedoman pada prinsip, landasan, asas, dan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Kata Kunci: Peran Koperasi dan Kesejahteraan Anggota

PENDAHULUAN

Secara teoritis koperasi memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi keunggulan sebagai badan usaha yang dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ideal sebagai badan usaha. Koperasi juga memiliki keunggulan potensial yang bisa menjadikannya efisien, posisi tawar yang kuat, pasar yang lebih pasti, sehingga koperasi memiliki keunggulan bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan usaha sendiri-sendiri. Namun demikian faktanya terdapat koperasi yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Koperasi yang berhasil tentunya koperasi yang mampu memberikan manfaat kepada anggotanya. Manfaat koperasi tersebut meliputi manfaat ekonomi dan non ekonomi.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggotanya melayani pelayanan dari setiap kegiatan usaha koperasi. Anggota harus merasakan bahwa dengan

pemenuhan kebutuhan ekonominya melalui koperasi lebih baik dibandingkan kalau bertransaksi dengan non koperasi. Manfaat ekonomi langsung yang diberikan koperasi dapat berupa selisih harga, kemudahan transaksi, kualitas produk yang lebih baik, ketersediaan barang lebih terjamin dan seterusnya. Intinya terbukti bahwa dengan berkoperasi anggota mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak berkoperasi.

Diantara sekian banyak koperasi, Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan adalah salah-satu yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup banyak kepada para anggotanya.

Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak jenis koperasi berbentuk koperasi simpan pinjam yang anggotanya adalah para Pegawai Negeri Sipil dari berbagai jenis dinas yang bertempat di Kota Medan. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan adalah salah satu koperasi dimana salah satu unit usahanya adalah unit usaha simpan pinjam (USP), yang seluruh anggotanya adalah para pegawai negeri sipil yang ada di setiap instansi yang ada di Kota Medan. Koperasi ini berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan yang keseluruhan anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah anggotanya 6.520 orang.

KPN Pemko Medan adalah koperasi yang mengedepankan kesejahteraan anggotanya lewat simpan pinjam yang tidak memberatkan para anggota. Koperasi yang berdiri sejak bulan April 1989 yang beranggota awalnya yaitu hanya 25 orang.

Mengingat pentingnya peranan koperasi disini, jadi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam menyejahterakan anggotanya. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan ini, diharapkan dapat membantu pembangunan sektor ekonomi anggotanya sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Anggotanya.”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *cooperation* dalam bahasa inggris, *Co* berarti bersama atau *operation* berarti bekerja. Jadi, *cooperation* berarti bekerjasama. Dalam hal

ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.¹

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau berorganisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuhkesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.²

Dasar Hukum Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berasaskan kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

Tujuan dan fungsi Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota dari pada laba untuk sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.⁴

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang butuhnya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu, atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan dari pada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi.⁵

¹ Bernhard Limbang *pengusaha koperasi* (Jakarta selatan margaretha pustaka Jl. Agung Raya no. 10 Lenteng Agung), 60.

² H. Hendi Suhendi *fiqh Muamalah* (Depok : Rajawali Press,2019),289.

³ Sahril Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Koperasi Kpn Kasabua Ade Kota Bima*,("Skripsi" IAI Muhammadiyah Kota Bima,2020), 12-13.

⁴ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember, 2014), 137.

⁵ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember, 2014), 137.

Kesejahteraan

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian dan bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks sejahtera, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁶ Kesejahteraan merupakan cita-cita utama suatu negara dengan visi pengentasan kemiskinan yang dapat direalisasikan dengan berbagai program penunjang.⁷ Keberadaan koperasi merupakan bagian dari program penunjang tersebut.

Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat memberikan kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan. Untuk itu, penting setiap anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari lembaga ini.

Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota.⁸⁹²

⁶ Dahliana Sukmasari “Konsep kesejahteraan masyarakat dalam pespektif Al – Qur’an”, *Journal of Qur’an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1 (juni 2020),16-17.

□Ismail, Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah (J-ESA)*, Volume 3, Nomor

⁹ Jumriani Nur peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al – markaz Al – Islam Makassar (“ Skripsi” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2019), 28.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri yaitu penelitian dilakukan dengan penelusuran dan pengamatan yang mendalam terhadap objek yang akan diteliti. Sehingga, outputnya menghasilkan fenomena-fenomena yang lebih komprehensif dan nyata.

Peneliti melakukan observasi, catatan, dan wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur selama proses pengumpulan data. Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan data. Kemudian menganalisis melalui pemulihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah 1) observasi secara langsung ke lapangan, 2) alat dan aplikasi seperti smartphone dan laptop, 3) Dokumen- Dokumen untuk mendukung penelitian seperti jurnal, buku, dan sebagainya.

Penelitian ini untuk pelaksanaannya dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan (KPN Pemko Medan) yang bertempat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.1, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231 yang juga sebagai objek dari penelitian sendiri. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 16 Januari sampai 18 Februari mulai dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana peran KPN Pemko Medan yang adalah koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil peneliti yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Basaruddin selaku Ketua I Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

“Pertama, Dari penjelasan bapak Ahmad Basaruddin di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota adalah dalam bentuk memberikan pinjaman yang cukup besar, memberikan beasiswa pendidikan bagi anggota keluarga anggota dan pelatihan, dan modal/pembiayaan usaha. Di mana Koperasi memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha

anggota. Sedangkan dalam bentuk pendidikan ialah dengan memberikan beasiswa bagi para keluarga anggotanya.”¹⁰

Informasi lain diperoleh dari pemaparan Ibu Nurmala Wulandari, selaku anggota biasa, menurutnya bahwa anggota bisa dapat secara langsung ke Koperasi apabila membutuhkan pinjaman.

“Bahwa anggota bisa pinjam langsung ke Koperasi apabila memerlukan dana mendadak, ini menjadi upaya yang dilakukan oleh koperasi yang dapat dirasakan langsung kepada anggota dalam memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan anggota. Kalau di tanya tentang kesejahteraan yang diberikan oleh koperasi ada, terutama kita sebagai anggota biasa disini, bisa pinjam untuk keperluan yang mendesak, saya pinjam ke koperasi dan mereka tidak menyulitkan, mudah sekali. Ini sangat membantu saya.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmala Wulandari selaku anggota biasa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan, peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan memberikan kemudahan kepada anggota dalam hal pemberian pinjaman, terutama terhadap suatu hal yang mendesak. Inilah yang menjadi salah satu tujuan koperasi, yang mampu hadir memberikan kemudahan kepada anggota yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan bagi anggota. Pinjaman yang diberikan Koperasi kepada anggota maksimal Rp 75.000.000, pemberian pinjaman tidak serta merta diberikan secara langsung kepada anggota, tetapi harus melalui tahapan. Alasannya untuk menghindari pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan anggota membayar.

Pemaparan dari Ibu Nurmala Wulandari bahwa:

“Peran koperasi Alhamdulillah dek, semenjak bergabung pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dengan mudah. Karena SHU yang diterima cukup banyak, Hal ini sangat membantu dalam menambah pemasukan. Kalau ditanya kesejahteraan yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan ini alhamdulillah sejahtera dan sangat membantu banget ketika kita pinjam di koperasi tersebut dan di sana juga cara pelayanan cepat, mudah sekali dan tidak menyulitkan, ini sangat membantu saya.”¹²

¹⁰ Ahmad Basaruddin, *wawancara* 13 November 2023

¹¹ Nurmala Wulandari, *Wawancara* 13 November 2023

¹² Nurmmala Wulandari, *wawancara* 14 November 2023

¹² Nurwadi, *wawancara* 14 November 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Nurwadi, peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan bagi anggota itu memberikan peranan, termasuk kepada anggota yang memperoleh SHU dari Koperasi. Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan pada umumnya memiliki pekerjaan juga sehingga bergabung pada Koperasi ini membantu menambah pemasukan. Pendapatan yang didapatkan dari SHU bisa dikatakan cukup banyak. Dengan demikian, penghasilan pertahun ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga anggota.

Pendapat Ibu Nurmala Wulandari juga didukung oleh pemaparan Bapak Nurwadi selaku anggota biasa menjelaskan bagaimana pelayanan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan kepada anggotanya:

“Alhamdulillah dek, kalau saya butuh uang untuk keperluan, saya bisa langsung pinjam di koperasi, tidak butuh pengurusan yang lama dan berbelit-belit, SHUnya juga cukup banyak.”¹³

Pembahasan

Dari hasil penelitian mengenai Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Pihak Koperasi sudah memikirkan sesuai dengan prinsip ekonomi. Ketika realisasi keuangan atau uang yang di cairkan ke anggotanya untuk dipergunakan dengan usaha mereka masing-masing. Pada saat mereka menjalankan sebuah roda bisnis dengan bantuan koperasi yang menyediakan modal kerja mereka secara langsung perekonomian dan kesejahteraan mereka terpenuhi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara keseluruhan bukan hanya ekonominya yang dibantu, tapi semua, dari segala bentuk permasalahan kehidupan sosial, tidak hanya masalah ekonomi mereka. Koperasi hadir untuk membantu ketika ada anggota yang dalam kesusahan dalam menjalankan bisnisnya.

Kesejahteraan itu sendiri merupakan suatu kondisi aman, damai, dan tenang. Dalam konteks penelitian ini, sejahtera yang dimaksud yaitu suatu kondisi di mana anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan sangat tercukupi kehidupan baik dari sisi material (pendapatan) maupun non material (kemampuan membeli barang). Badan pusat statistik memiliki beberapa indikator yang dijadikan ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan. Adapun indikator tersebut antara lain:

1. Pendapatan Material

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan ini akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang yang pada akhirnya taraf hidup seseorang akan berubah kearah yang lebih baik.

Anggota Koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang diperoleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan adapun anggota Koperasi, selain mendapatkan SHU juga mendapat pendapatan berupa gaji. SHU hingga pada akhir tahun Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan yaitu Rp 8.581,801,658, dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri.

Selain itu salah satu kontribusi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan yang bersifat ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fairah, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan memberikan kemudahan kepada anggota dalam hal pemberian pinjaman, terutama terhadap suatu hal yang mendesak. Inilah yang menjadi salah satu tujuan koperasi, yang hadir mampu memberikan kemudahan kepada anggota yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan bagi anggota. Pinjaman yang diberikan Koperasi kepada anggota maksimal Rp 75.000.000, pemberian pinjaman tidak serta merta diberikan secara langsung kepada anggota, tetapi harus melalui tahapan. Alasannya untuk menghindari pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan anggota membayar.

2. Kemampuan Anggota Membeli Barang (Non material)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fairah peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan bagi anggota itu memberikan peranan, termasuk kepada anggota yang memperoleh SHU dari Koperasi. Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan, yang terdiri dari pegawai negeri dan mereka bergabung pada Koperasi ini membantu menambah pemasukan. Pendapatan yang didapatkan dari SHU Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan, bisa dikatakan juga sangat besar. Sehingga penghasilan yang didapat selain dapat memenuhi kebutuhan primer, juga dapat memenuhi kebutuhan tersier dan sekunder.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Medan ini memiliki peran yang sangat besar terhadap anggota dalam menyejahterakan ekonomi anggotanya. Peran Koperasi tersebut antara lain: membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit, pembiayaan usaha anggota, beasiswa pendidikan bagi keluarga anggota pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Serta memberikan SHU yang sangat besar.

Saran

1. Hendaknya koperasi selalu meningkatkan dan mempertahankan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang menjadi anggota
2. Hendaknya koperasi selalu melakukan perbaikan terhadap usaha-usaha yang targetnya belum tercapai. koperasi selalu tetap berpedoman pada prinsip, landasan, asas, dan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang menjadi anggota koperasi sesering mungkin mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang koperasi agar anggota dapat berpartisipasi aktif di koperasi dan merubah pola penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi. 19. *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: Alumni.
- Zain, Djumilah. 2017. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Modal Bagi Rumah Tangga Miskin di Pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume II No. 1*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Harahap Friska Indria Nora. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Pemulung Sampah Sungai Citarum Melalui Koperasi Bangkit Bersama. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*.4(1):180-186.
- <https://www.bps.go.id/publication/2020/6/7/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019.html> diakses pada 7 juni 2020
- Ikbaldin.2019. Peran Koperasi UIKA (KIKA) dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus pada Koperasi KIKA Universitas IBN Khaldun Bogor). *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah*. Vol 3 No. 1 January 2019 Page 115-129.
- Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diterbitkan oleh Sinar Grafika
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- Firdaus, Muhammad dan Agus Edi Susanto. 2002. *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Galuh, Ajeng Kartika. 2008. Peran Koperasi Simpan Pinjam
Bernhard Limbang pengusaha koperasi (Jakarta selatan margaretha pustaka Jl. Agung Raya no. 10 Lenteng Agung),
H. Hendi Suhendi fiqh Muamalah (Depok : Rajawali Press,2019),
Sahril Akbar, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Koperasi Kpn Kasabua Ade Kota Bima,(”Skripsi” IAI Muhammadiyah Kota Bima,2020),
Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, (Desember, 2014), 137.
Dahlia Sukmasari “Konsep kesejahteraan masyarakat dalam pespektif Al – Qur’an”,journal of Qur’an and Hadis Studies, Vol. 3 No. 1 (juni 2020),16-17.
Ismail, Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah (J-ESA), Volume 3, Nomor